

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BALOLI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA

Iin Amriani

Email: iinamriani@gmail.com

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palopo

ABSTRAK

This study aims to determine the role of village-owned enterprises in community empowerment carried out in Baloli Village, Masamba District, North Luwu Regency. The research approach used is descriptive qualitative research. The object of the research is BUMDes Siujun Pisarrin Baloli Village. The types of data used are primary and secondary data, the collection techniques of which are observation, interviews and documentation.

Research result shows that the BUMDes Siujun Pisarrin Baloli Village has several business units, namely the rental of goods business. From this program in empowering the Baloli village community, the community empowerment program through the rental business unit is the most dominant at this time, which with this program is expected to help and develop village communities. The role of BUMDes siujun pisarrin in community empowerment is said to have not been effective because there are still many BUMDes managers who are not active and do not participate in the management. The obstacles experienced by BUMDes in community empowerment in Baloli Village are the limited ability of managers, environmental limitations, Covid-19 factors, institutional management that has not been maximized and lack of knowledge and community participation in advancing the managed business units.

Keywords: *The role of BUMDes, Community Empowerment.*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Untuk pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah BUMDes Siujun Pisarrin Desa Baloli. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang teknik pengumpulannya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Siujun Pisarrin Desa Baloli memiliki beberapa unit usaha yaitu usaha penyewaan barang. Dari program tersebut dalam pemberdayaan masyarakat desa Baloli, program pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha penyewaan barang yang paling dominan saat ini, yang dimana dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu dan mengembangkan masyarakat desa. Peran BUMDes siujun pisarrin dalam pemberdayaan masyarakat dikatakan belum efektif karena masih banyak pengelola BUMDes yang tidak aktif dan tidak ikut serta dalam pengelolaan tersebut. Hambatan yang dialami BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Baloli adalah keterbatasan kemampuan pengelola, keterbatasan lingkungan, faktor

Covid-19, manajemen kelembagaan yang belum maksimal serta kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola.

Kata kunci : Peran BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung kebijakan daerah kabupaten atau kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa, sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasila. Di Desa Baloli Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu

Utara merupakan desa yang dikenal dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dengan hasil pertanian dan perkebunan yang baik dan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa didirikan pada tahun 2014, dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Siujun Pisarrin. Pemerintah Desa Baloli mendirikan BUMDes berdasarkan hasil keputusan musyawarah Desa dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tercapainya lembaga perekonomian yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan nilai ekonomis dari potensi ekonomi Desa.
2. Memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Mengurangi (menghapus) angka kemiskinan masyarakat desa dan menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli desa tanpa harus membebani masyarakat.
5. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa serta melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya yang mengarah pada terciptanya pemberdayaan perekonomian Desa.

6. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

Pemerintah Desa Baloli juga sangat berinisiatif untuk mendirikan dan membangun BUMDes di daerahnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kemajuan daerahnya. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Baloli maka BUMDes Siujun Pisarrin melakukan atau memberdayakan masyarakat dengan mengelola potensi yang ada di wilayah tersebut serta membuka usaha penyewaan barang untuk memudahkan masyarakat. Mayoritas mata pencaharian penduduk disana adalah mengelola perkebunan rambutan, durian, cempedak, coklat, cengkeh, langsung, kelapa sawit, dan lada.

BUMDes sebagai program pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan dapat memberikan perubahan dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Sehingga menjadi 1. Bagaimana

peran BUMDes dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ? 2. Apa hambatan BUMDes dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 pengertian peran

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial, menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.

2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Maryunani BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desaan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes

Menurut Samadi Rahman.A.2015:7 maksud dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni :

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

- a. Menumbuhkembangkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat masyarakat desa
- d. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah :

- a. Meningkatkan peranan masyarakat yang ada di desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dan unit-unit usaha desa.
- c. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa.
- d. Meningkatkan kreativitas berwirausaha desa masyarakat yang berpenghasilan rendah.

2.2.3 Landasan hukum BUMDes

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pemerintah bahkan

membuat suatu bab khusus mengenai BUMDes yaitu pada BAB X BADAN USAHA MILIK DESA dalam pasal 87 yang berbunyi :

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDES
- b. BUMDES dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotoroyongan.
- c. BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Prinsip pengelolaan BUMDes

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDES diantaranya adalah :

- a. Komperatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong usaha BUMDES.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan

masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

2.2.5 Pengurus dan pengelolaan BUMDes

Organisasi pengelolaan BUMDes hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa (Kamaroesid, 2016). Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pelaksanaan operasional
- c. Pengawasan

2.2.6 Langkah-langkah pendirian BUMDes

- a. Menurut Putra (2015:28-29) dalam (Astuti 2017), inisiatif sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), baik secara langsung maupun bekerjasama
- b. Musyawarah desa

2.2.7 Ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial

- a. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- b. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- c. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
- e. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial di desa.
- f. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal.
- g. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (*village policy*).
- i. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes

j. Pelaksanaan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

2.2.8 Klasifikasi jenis usaha BUMDes

Anom Surya Putra dalam (Fauzi, Miranda Dwi 2019) Adapun jenis pengklasifikasian Badan Usaha Milik Desa antara lain :

- a. *Serving* BUMDes menjalankan “bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat
- b *Banking* BUMDes menjalankan “bisnis uang”, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.
- c. *Renting* BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan juga untuk meningkatkan pendapatan desa.
- d. *Brokering* BUMDes menjadi lembaga perantara atau menjual jasa pelayanan kepada warga.
- e. *Trading* BUMDes menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

f. *Holding* BUMDes sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa.

2.3 Pemberdayaan masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Subejo (2013:59) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan social

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mardikanto (2014:202) mengemukakan, ada enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat, yakni:

- a. Perbaikan kelembagaan (Better Institution)
- b. Perbaikan Usaha (Better Business)
- c. Perbaikan Pendapatan (Better Income)
- d. Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*)
- e. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)
- f. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

2.3.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ginanjar Kartasasmita, implementasi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga upaya :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menyediakan lingkungan, prasarana, dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat di akses oleh masyarakat.
- c. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah.

2.3.4 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

- a. Prinsip Kesetaraan
- b. Prinsip Partisipasi
- c. Keswadayaan atau kemandirian
- d. Berkelanjutan

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kualitatif, definisi dari kualitatif sendiri menurut Arikunto dalam Rohman (2011) yang pada hasil akhirnya dinyatakan dengan tolak ukur yang sudah ditentukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berbentuk kata dan kalimat

3.2 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya yaitu seberapa besar peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baloli. Adapun penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan.

3.4 Populasi dan sampel

Metode penentuan subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampel. Dalam mengambil sampel, peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya informan tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan, atau mungkin informan tersebut sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjeleajahi onyek/situasi sosial yang diteliti.

3.5 Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung penelitian dari subyek data ini berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

3.6 Teknik Pengumpulan data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

3.7 Instrument Penelitian

1. Telepon genggam
2. Kamera
3. Laptop

3.8 Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini ada sebanyak 9 orang yang diambil terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes, sekretaris dan Bendahara BUMDes serta masyarakat di Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

3.9 Teknik Analisis Data

1. Reduksi data/*data reduction*, yaitu proses pemilihan, pengklarifikasian, pengabstraksian atau transparansi data yang diperoleh dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci.
2. Penyajian data/*data display*, yaitu sekumpulan informasi dan data yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian tersebut bisa

dalam bentuk uraian, grafik, dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan/*conclusion*, yaitu penganalisaan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Pembahasan

4.2.1 Program BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat

Program dari BUMDes yaitu penyewaan barang untuk masyarakat desa Baloli. BUMDes Siujun Pisarrin masih dalam tahap perkembangan. Dengan adanya BUMDes ini dapat membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi yang digerakkan oleh BUMDes dengan unit usaha penyewaan barang.

1. Pendapatan

Pendapatan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya di alokasikan untuk konsumsi, kesehatan maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

2. Unit jasa

Unit usaha yang telah didirikan oleh BUMDes ialah unit usaha penyewaan barang. Berdasarkan hasil

wawancara dengan direktur BUMDes bapak Sahnun S.Pd, adapun bentuk penyewaan meliputi :

1. Sewa tenda

Penyewaan tenda ini sangat berdampak baik bagi masyarakat khususnya dikalangan anak muda yang suka traveling atau nanjak ke gunung.

2. Sewa gedung serba guna

Sewa gedung juga memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat, dimana masyarakat dapat memanfaatkan gedung tersebut untuk melakukan sebuah acara yang mendatangkan banyak orang dan dari diadakannya acara tersebut masyarakat dapat menjual berbagai macam makanan seperti makanan ringan maupun berat.

3. Sewa alat bermain

Penyewaan yang satu ini juga tidak kalah menarik yakni penyewaan sepeda, anak muda di zaman sekarang ini sangatlah gemar melakukan kegiatan di sore hari yaitu bersepeda. Dari situlah BUMDes menyiapkan penyewaan sepeda yang juga dapat dipakai pada kegiatan sepeda santai yang biasanya diadakan oleh pemerintah daerah. Kemudian penyewaan Boneka badut yang juga bisa dipakai di berbagai macam acara seperti jalan santai dan acara ulang tahun.

4.2.2. Kegiatan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat

a. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilakukan oleh pengurus BUMDes adalah untuk memberikan informasi mengenai berdirinya BUMDes. Kegiatan penyuluhan ini juga dilakukan dalam bentuk sosialisasi unit usaha yang dijalankan oleh desa Baloli melalui BUMDes kepada masyarakat, agar ikut serta merealisasikan unit usaha tersebut.

Bapak Sahnun S.Pd selaku direktur BUMDes Siujun Pisarrin menyatakan bahwa penyuluhan ini dilakukan agar penyewaan barang yang dibentuk oleh BUMDes sesuai kebutuhan masyarakat yang dapat membantu mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Baloli.

b. Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan yang dilakukan oleh BUMDes bekerja sama dengan Ibu ketua PKK sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa Baloli. Kegiatan pelatihan ini guna untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Ibu Elma Novita Sukma selaku bendahara BUMDes mengatakan walaupun pelatihan kewirausahaan ini berjalan pada kegiatan yang cukup kecil bukan berarti tidak memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Baloli.

4.2.3 Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Baloli

Dari hasil wawancara bersama Bapak Solihin S.Sos selaku Kepala Desa Baloli menyatakan bahwa BUMDes Siujun Pisarrin sudah menjalankan peran sebagai pengembangan potensi masyarakat yang menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, contohnya memberikan penyewaan barang kepada masyarakat desa Baloli. BUMDes Siujun Pisarrin mempunyai peran dalam pemberdayaan masyarakat, Hal ini dilihat dari masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga BUMDes dapat dikatakan mampu memberdayakan masyarakat, melindungi masyarakat, mencegah persaingan, memfasilitasi masyarakat dan mengelola sumber daya lokal walaupun masih dalam skala kecil. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan. Upaya dalam pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki dan memberdayakan masyarakat serta penanggulangan.

4.2.4 Hambatan BUMDes dalam pemberdayaan Masyarakat

1. Keterbatasan kemampuan pengelola
2. Keterbatasan lingkungan
3. Faktor covid-19
4. Manajemen kelembagaan yang belum maksimal
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMBDes
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang kurang dan belum optimal berdampak kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian penting dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Budi Rasmianto Berutu (2019) dengan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milim Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa Mungkur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BUMDes Mungkur Nicho dikatakan belum efektif, karena pendapatan yang diperoleh warga

masyarakat desa mungkur, Pendapatan yang diperoleh belum mencapai kriteria untuk dikatakan berdaya. Hal ini karena belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh BUMDes Mungkur Nicho terhadap warga yang mendapat tidak ikut serta di dalamnya.

Penelitian yang dilakukan Dwi Susilowati (2020) juga sejalan dengan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sinduharjo Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa BUMDES Sinar Harapan pada kenyataannya belum dapat memaksimalkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum merata masih ada ketimpangan di desa Isorejo.

Penelitian yang dilakukan Halimatus Sakdiah (2018) juga sejalan dengan penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peran BUMDes didesa Liberia belum dapat memaksimalkan perannya dalam memberdayakan masyarakat, seperti belum meratanya bagi sebagian masyarakat, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen

BUMDESA dalam mengolah potensi yang ada didesa Liberia.

PENUTUP

1.1 Simpulan

- a. BUMDes Siujun Pisarrin dalam pemberdayaan masyarakat desa Baloli memiliki program unit usaha yaitu unit usaha penyewaan barang. Dari program tersebut dalam pemberdayaan masyarakat desa Baloli, program unit usaha penyewaan barang yang paling dominan saat ini, yang dimana dengan adanya program tersebut diharapkan dapat membantu dan mengembangkan masyarakat desa.
- b. Tujuan program yang dilakukan BUMDes Siujun Pisarrin melalui unit usaha penyewaan barang yang bertujuan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat didapat hasil kurang efektif karena pengelola BUMDes tidak mengolah dengan baik barang yang disewakan tersebut.
- c. Pemantauan program yang dilakukan BUMDes Siujun Pisarrin dikatakan belum efektif karena masih banyak pengelola BUMDes yang tidak aktif dan tidak ikut serta dalam pengelolaan tersebut.
- d. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUMdes desa Baloli sudah terlibat dalam program-program

yang sudah dijalankan oleh BUMDes yaitu dengan cara mengikuti dan menjadi anggota dalam setiap program yang ada tapi baru sebagian masyarakat. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain : Keterbatasan kemampuan pengelola, Keterbatasan lingkungan, Faktor covid-19, Manajemen kelembagaan yang belum maksimal, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes dan Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memajukan unit usaha yang dikelola.

1.2 Saran

- a. Untuk pengurus dan pengelola Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Siujun Pisarrin desa Baloli agar kiranya aktif dalam mengelola BUMDes serta memperbaiki pengelolaan manajemen keuangan BUMDes untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber manusia (pengelolanya atau pengurusnya).
- b. BUMDes Siujun Pisarrin untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Baloli.
- c. BUMDes Siujun Pisarrin untuk melakukan pengembangan BUMDes dapat membentuk unit usaha baru

dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya unit usaha baru dapat membuka akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Baloli.

- d. Bagi masyarakat hendaknya ikut serta langsung dalam pengelolaan BUMDes.
- e. Bagi para akademik, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi :

- Adnan, A. 2021. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pitumpidange Kecamatan Lampung Kabupaten Bone. *Skripsi. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.*
- Berutu, B.R. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. *Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Publik. Universitas Medan Area.*
- Fauzi, M.D (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono

- Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. *Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.*
- Hartini, 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Batetangnga Kab. Polman. *Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Pare-pare.*
- Kapanta, O.A. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap perekonomian Desa. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.*
- Mujiyono. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.*
- Susilowati, D. 2020. Analisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Lampung.*
- Sakdiah, H. 2018. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai. *Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera utara.*
- Syahrida. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dalu Sepuluh A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan.*
- Jurnal :**
- Darwita, I.K & Redana, D.N. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 2(1), h.7
- Mardikanto, T. & Soebiato, P. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2013), h.52
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1).1-9.
- Samadi., Rahman, A., & Afrizal. (2015). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Manajemen Ekonomi*, 2(1),1-19.
- Artikel online/media online :**
- Riadi, M. 2017. "Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat". (Online). Tersedia : <https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html?m=1>

Sugiono. 2014 Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung : Alfabeta.

Sugiono. 2011 Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung Alfabeta.

Undang-undang :

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005

Undang-undang No. 6 tentang Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah